

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga masyarakat yang buta aksara merupakan penghambat utama baginya untuk bisa mengakses informasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap positifnya. Akibatnya, mereka tidak mampu beradaptasi dan berkompetisi untuk bisa bangkit dari himpitan kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan dalam kehidupannya. Setiap warga masyarakat perlu memiliki kemampuan keaksaraan fungsional, yang memungkinkan seseorang dapat beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang selalu berubah dan kompetitif.

Tujuan berbangsa secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam rangka itulah tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pandangan idealistik ini mendasari pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa. Tidak terbantahkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan arahan normatif bagi pembangunan pendidikan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka ditempuh tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Kemitmen nasional yang secara tegas terformulasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, diikuti dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun

2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Dalam merealisasikan komitmen nasional tersebut, maka pada jalur pendidikan nonformal, melalui prakarsa keaksaraan untuk pemberdayaan masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal sejak tahun 2009 menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa yang sudah pernah mengikuti pendidikan keaksaraan kembali buta huruf apabila kemampuan keaksaraannya tidak digunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Menurut data kependudukan Kabupaten Gowa (2015), menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 709.386 orang, didalamnya terdapat penduduk buta aksara mencapai 36.400 orang (5,1%) , yang terdiri dari 15.445 laki-laki dan 20.955 perempuan. Khusus di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, warga buta aksara yang usia 15 – 59 tahun masih terdapat 3.476 orang, terdiri 1.499 laki-laki dan 1.977 perempuan. Jumlah warga buta aksara di Kecamatan Pallangga termasuk paling besar jumlahnya dibanding tujuh belas kecamatan lainnya. Angka buta aksara tersebut, setiap tahun berubah disebabkan oleh perpindahan penduduk, baik yang masuk maupun yang meninggalkan daerah tersebut.

Pekerjaan penduduk di daerah Kecamatan Pallangga pada umumnya bertani padi dan berkebun, selain itu, sebagian warga masyarakat memiliki pekerjaan sebagai pembuat batu bata, pedagang, pegawai negeri, dan swasta. Bagi sebagian kaum perempuan dewasa dan ibu rumah

tangga, selain memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau buta huruf, juga tidak memiliki keterampilan kerja, sehingga hidupnya tergantung kepada kaum laki-laki atau suami. Hal ini, perlu mendapat intervensi dalam kehidupan mereka, terutama di bidang pendidikan nonformal, agar mereka dapat berdaya guna.

Penyebab utama mereka buta aksara adalah mereka belum menyadari permasalahan yang melingkupi dirinya jika buta aksara, belum ada program pembelajaran keaksaraan yang dapat melayani mereka, masih ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak perlu melek aksara yang penting dapat menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suami dengan baik.

Hasil penelitian oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kerjasama Ditjen PAUDNI Kemdiknas (2010) menemukan bahwa dari 3.048 orang luaran program pendidikan keaksaraan yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 54% yang belum tuntas atau belum melek aksara, artinya luaran program tersebut harus mengulang kembali program pembelajarannya pada tahun berikutnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena program pemberantasan buta aksara melalui pembelajaran keaksaraan setiap tahun banyak menghabiskan biaya tapi hasilnya kurang memuaskan.

Hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa program pemberantasan buta aksara, untuk menjadikan warga belajar melek aksara, dengan menggunakan model konvensional yang dilakukan oleh para penyelenggara dan tutor di lapangan, berlangsung rata-rata delapan bulan (Latif, 2011). Hal ini menunjukkan waktu yang masih lama dan kurang efektif serta jauh dari harapan.

Warga Buta aksara kaum perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari kaum laki-laki, banyaknya biaya yang digunakan dalam program pembelajaran keaksaraan karena warga belajar ada yang mengulang mengikuti pembelajaran tahun berikutnya, dan lamanya waktu belajar

berlangsung di kelompok belajar; menunjukkan bahwa program pembelajaran keaksaraan masih kurang berhasil.

Keberhasilan pemberantasan buta aksara harus ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain rekrutmen dan penyiapan warga belajar yang tepat, keterlibatan dan kemampuan mengajar tenaga pendidik/tutor, kurikulum yang relevan, sarana dan prasarana yang cukup memadai, suasana belajar yang kondusif, dan proses penilaian yang tepat. Selain itu, motivasi belajar warga belajar juga ikut menentukan terhadap keterlibatan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran keaksaraan. Salah satu faktor yang diharapkan dapat merangsang warga belajar mengikuti pembelajaran keaksaraan, apabila materi keaksaraan berkaitan dengan kebutuhan belajar warga belajar, yang diintegrasikan dengan keterampilan kerja..

Percepatan penuntasan buta aksara selain menggunakan model pembelajaran keaksaraan konvensional seperti yang dilaksanakan selama ini, dengan menggunakan bahan ajar dalam bahasa Indonesia, dengan buku paket yang disusun secara sentralisasi telah berhasil menurunkan angka buta aksara. Namun dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki pembelajaran keaksaraan konvensional seperti telah digambarkan pada uraian sebelumnya, maka perlu dikembangkan model pembelajaran keaksaraan yang lebih efektif yang dapat melayani warga belajar kaum perempuan. Pendidikan harus mampu memberikan layanan yang mudah, murah dan mempercepat pemahaman warga masyarakat terhadap materi pembelajaran keaksaraan yang disampaikan, serta hasilnya dapat menuntaskan buta aksara lebih cepat. Model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja (model pembelajaran Aksarakerja) diharapkan menjadi salah satu alternatif model pembelajaran keaksaraan yang efektif bagi kaum perempuan buta aksara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut

1. Bagaimana gambaran pembelajaran keaksaraan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagai kebutuhan model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja?
2. Bagaimana gambaran desain model konseptual pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja?
3. Apakah model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja valid, praktis, dan efektif dalam menuntaskan buta aksara bagi kaum perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi data tentang permasalahan, potensi, dan kebutuhan belajar keaksaraan dan keterampilan kerja warga buta aksara di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
2. Merancang model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja
3. Menghasilkan model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja yang valid, praktis, dan efektif bagi warga buta aksara kaum perempuan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Usaha memberikan layanan pendidikan yang mudah dan murah menjadi impian kita semua, melalui pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja dapat mempermudah dalam memahami materi baca, tulis dan berhitung, sekaligus memberikan peluang kepada luaran program pembelajaran keaksaraan untuk menguasai keterampilan kerja tertentu..

1. Manfaat Teoretis

Menambah wawasan keilmuan pendidikan nonformal, mengenai model pembelajaran keaksaraan yang efektif, dalam upaya melayani warga masyarakat buta aksara yang pada umumnya tergolong orang dewasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi panduan bagi penyelenggara dan pemerhati pendidikan nonformal terutama pembelajaran keaksaraan, untuk mempercepat pemberantasan buta aksara warga masyarakat
- b. Dapat menjadi panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja, sebagai salah satu model pembelajaran keaksaraan yang efektif dalam melayani kebutuhan belajar warga buta aksara.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang berbagai hal yang ditemukan dalam penelitian ini, maka diberikan penjelasan sebagai berikut

1. Pengembangan model adalah serangkaian kegiatan mendesain, membuat, menilai, dan merevisi suatu produk atau model yang dikembangkan, yaitu Model Pembelajaran Keaksaraan Terintegrasi Keterampilan kerja; disingkat model pembelajaran Aksarakerja.
2. Pembelajaran keaksaraan adalah suatu bentuk layanan pendidikan non formal yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi warga buta aksara
3. Terintegrasi mengandung arti bahwa dalam penyampaian materi keaksaraan selain memberikan materi keaksaraan secara khusus, juga diberikan materi keterampilan kerja untuk memperkuat kemampuan keaksaraan warga belajar.
4. Keterampilan kerja adalah suatu keterampilan khusus yang dapat digunakan dalam bekerja atau berusaha, sebagai bagian dari fungsionalisasi hasil belajar pembelajaran keaksaraan.

5. Model Pembelajaran Keaksaraan Terintegrasi Keterampilan Kerja yang berkualitas memiliki tiga kriteria, yaitu valid, praktis, dan efektif
6. Kevalidan Model Pembelajaran Keaksaraan Terintegrasi Keterampilan Kerja, yaitu apabila penilaian validator (ahli) menunjukkan bahwa model pembelajaran tersebut dilandasi oleh teori yang kuat serta memiliki konsistensi internal, yakni saling keterkaitan antarkomponen dalam model pembelajaran.
7. Kepraktisan Model Pembelajaran Keaksaraan Terintegrasi Keterampilan Kerja yaitu apabila menurut penilaian para validator (praktisi/tutor) menyatakan bahwa model pembelajaran tersebut dapat diterapkan. Selain itu, hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran oleh observer di kelompok belajar keaksaraan termasuk kategori baik atau sangat baik
8. Keefektifan Model Pembelajaran Keaksaraan Terintegrasi Keterampilan Kerja yaitu apabila memenuhi tiga indikator, yaitu (a) ketercapaian hasil belajar pada skor minimal 80, (b) aktivitas yang dilakukan warga belajar sesuai dengan aktivitas yang diharapkan sebagaimana dalam sintaks pembelajaran, dan (c) kemampuan tutor mengelola pembelajaran berada pada kategori tinggi.

F. Spesifikasi Produk

Model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja memiliki produk yang terdiri atas (1) buku model pembelajaran, (2) buku/bahan belajar, (3) rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan (4) lembar kegiatan warga belajar atau LKWB.

1. Buku model Pembelajaran Keaksaraan berisi uraian yang meliputi: (1) rasional model pembelajaran Aksarakerja, (2) Teori-teori pendukung, (3) Komponen Model Pembelajaran Aksarakerja, dan (4) Strategi Implementasi Pembelajaran.

2. Buku/bahan belajar berisikan materi membaca, menulis dan berhitung dasar, yang terintegrasi keterampilan kerja. Formatnya terdiri dari (a) nama buku, (b) kompetensi dasar keaksaraan yang ingin dicapai, (c) petunjuk pemakaian/ mempelajari, dan (d) sajian materi yang dilengkapi soal latihan
3. RPP yang dirancang mengikuti 5 komponen model pembelajaran, yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan dampak pengiring. Format RPP, yang terdiri dari: (a) nama mata pelajaran, (b) satuan pendidikan, (c) tahun pembelajaran dilaksanakan, (d) alokasi waktu yang disediakan, (e) kompetensi dasar (f) indikator, (g) tujuan pembelajaran, dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor, (h) pokok materi pembelajaran, (i) metode pembelajaran, (j) sumber dan media pembelajaran, (k) langkah-langkah pembelajaran, terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir, dan (l) penilaian
4. LKWB dirancang mengacu pada tujuan pembelajaran dan bahan belajar dengan memperhatikan aspek kebutuhan belajar membaca, menulis dan berhitung serta keterampilan kerja bagi warga belajar perempuan. Formatnya terdiri dari (a) nama mata pelajaran (b) alokasi waktu yang disiapkan, (c) penjelasan mengerjakan soal latihan, dan (d) soal-soal latihan

G. Asumsi

Ada beberapa asumsi yang mendasari dilakukannya pengembangan model pembelajaran keaksaraan terintegrasi keterampilan kerja (model pembelajaran Aksarakerja), antara lain sebagai berikut.

Peserta didik (warga belajar) adalah orang dewasa sekalipun buta aksara, namun telah memiliki kekayaan pengalaman belajar dan pengalaman hidup yang keberadaannya dapat dikembangkan sebagai bahan pembelajaran unik dan menarik dalam pendidikan orang dewasa.

1. Peserta didik merupakan individu yang memiliki kebutuhan belajar, sehingga melalui intervensi pembelajaran kebutuhan belajar tersebut dapat terpenuhi.
2. Pembelajaran merupakan hasil rekayasa sosial (*social engineering*) yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang keberadaannya dapat diubah, dibentuk, dirumuskan, dan dikaji sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembelajaran itu sendiri
3. Pembelajaran adalah proses interaksi antara warga belajar dan tutor dengan melibatkan aspek fisik dan psikis sumber belajar untuk menghasilkan seperangkat kapasitas dan kapabilitas diri warga belajar dalam mengelola perubahan lingkungan
4. Setiap pembelajaran selalu memerlukan organisasi, perencanaan, dan model pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengembangan model pembelajaran merupakan kebutuhan dan dapat dikonstruksi sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan belajar.

H. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan model pembelajaran Aksarakerja, dikemukakan sebagai berikut

1. Pengujian keefektifan model pembelajaran Aksarakerja masih terbatas pada dua kelompok belajar keaksaraan, dengan jumlah 10 warga belajar di Kelompok Belajar “Baji Areng I” dan 10 warga belajar di Kelompok Belajar “Baji Areng II”
2. Tutor yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yang bertugas sebagai tutor model dalam melaksanakan proses pembelajaran, maupun tutor yang mengamati hanya diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pembelajaran dan penilaian pengamatan dalam waktu yang tidak lama.

3. Proses pengamatan dan penilaian terhadap aspek kepraktisan dan keefektifan model pembelajaran dilakukan secara bersamaan/serentak, dan kehadiran pengamat/observer dalam kelas yang dapat mempengaruhi perilaku tutor dan warga belajar.